

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Demokrasi yang secara normatif adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, ungkapan ini diterjemahkan dalam setiap negara yang menganut demokrasi, di Indonesia tercantum di dalam UUD 1945 (setelah Amandemen) pada Pasal 1 ayat (2): “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar*”. Negara demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap kebijakan mengacu pada aspirasi rakyat. Indonesia, negara yang menggunakan sistem demokrasi dimana rakyat memiliki peranan penting di dalam urusan negara.

Demokrasi merupakan kekuasaan rakyat berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil bagian dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kekuasaan para pemimpin dan pejabat formal itu bukan muncul dari pribadinya, akan tetapi merupakan titipan rakyat atau merupakan kekuasaan yang dilimpahkan rakyat kepada pemimpin dan pribadi-pribadi penguasa. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasinya suatu negara.

Eksistensi negara itu sendiri tidak lebih dari suatu produk perjanjian sosial, dimana individu-individu dalam suatu masyarakat bersepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama (*common power*) seperti diungkapkan Rousseou dalam teori kontrak sosial. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara dan mendapat mandat dari rakyat untuk mengayomi dan menjaga keamanan

maupun harta benda mereka. Kekuasaan negara akan tetap absah (*legitimate*) selama negara menjalankan kehendak rakyat yang memberi mandat kepadanya.<sup>1</sup>

Rakyat membuat kontrak sosial lewat untuk mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah yang dipilih. Maka akan ada aturan main yang berupa Undang–Undang Dasar, Peraturan Hukum dan sebagainya. Kemudian dibuat dan ditetapkan dengan maksud agar dengan sarana-sarana kekuasaan titipan yang dilaksanakan oleh pejabat atau penguasa itu benar–benar demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dan tidak dimanipulasikan untuk kepentingan pribadi para pemimpin dan pejabat untuk mengambil keuntungan dan memperkaya diri.<sup>2</sup> Pembuatan kontrak sosial dilakukan melalui pemilu (pemilihan umum), yakni sarana demokrasi yang daripadanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi dilembaga politik negara, legislatif dan eksekutif. Melalui pemilu, rakyat memilih figur yang dapat dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif dan jabatan eksekutif. Dalam pemilu, rakyat yang telah memilih, secara bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang di nilai sesuai dengan aspirasinya.<sup>3</sup>

Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilu atau Pilkada atau disebut *voter turnout* tentu menjadi kebanggaan bagi setiap warga negara, karena proses itu bermakna bahwa publik berpartisipasi penuh dalam menentukan nasib demokrasi dan bangsanya di masa yang akan datang. Begitulah kondisinya jika hasil pemilu atau Pilkada memberi efek dan manfaat yang signifikan bagi kehidupan mereka. Kenyataanya, tak sedikit rakyat yang tidak mau terlibat dalam proses pemilu atau Pilkada. Mereka lebih suka menggunakan hak pilihnya dengan tidak

---

<sup>1</sup> Launa. GB, “*Perkembangan Pemikiran Negara: Dari Socrates Samapai Marx*”. Jurnal Ilmu Politik Progresif Vol 1. No 3 Thn 2001, h. 22-23

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, Bandung: Mandar Maju, 1996, h.156-158.

<sup>3</sup> Thamrin , *Kerangka Kerja Sistem Politik Indonesia*, Padang : Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2012 h. 97-98.

memilih atau Golput. Ini adalah realitas politik yang harus diakui dalam konteks demokrasi di Indonesia.<sup>4</sup>

Partisipasi politik urgen dalam dinamika perpolitikan di suatu masyarakat. Partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka niscaya terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilkada menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan suatu negara. Individu masyarakat diposisikan sebagai aktor penting karena pada hakekatnya demokrasi didasarkan pada logika gagasan bawa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang individu masyarakat yang diperintah. Melalui partisipasi politik yang diartikan sebagai: Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi – pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat individual maupun kolektif, terorganisir ataupun spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.<sup>5</sup>

Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. Sebagaimana dikemukakan oleh Verba dalam Munjani<sup>6</sup>

*“partisipasi politik adalah berbagai aktifitas yang dilakukan oleh individu-individu warganegara yang kurang lebih secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan aparat pemerintah dan/atau aksi maupun kebijakan yang mereka ambil”*

---

<sup>4</sup> Pangi Syarwi, *Titik Balik Demokrasi : Petunjuk Bagi Para Pejuang Demokrasi*, Jakarta. Pustaka Intelegensia 2012, h.4

<sup>5</sup> Samuel P. Huntington; Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990. h.5.

<sup>6</sup> Syaiful Munjani, *Muslim demokrat : Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012. h.256.

Partisipasi yang paling mudah dan umum dilaksanakan adalah melalui pemilu. Masyarakat yang mengikuti pemilu disebut pemilih. Menurut Firmanzah, secara garis besar pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan. Secara sederhana pemilih adalah mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU karena telah memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang.<sup>7</sup> Pemilih memiliki hak untuk mengikuti pemilu dan memberikan suaranya kepada kandidat yang didukungnya, tetapi juga memiliki hak untuk tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan faktor tertentu. Besarnya jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya secara umum disebut *voter turnout* bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan sistem pemilu yang kemudian juga menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi suatu negara.

Perkembangan partisipasi kehadiran masyarakat dalam pemilu (*voter turnout*) di Indonesia sudah dimulai pada 1955, pemilu pertama dalam sejarah republik ini diikuti lebih dari 100 partai peserta untuk memilih dewan perwakilan Konstituente. Dalam suasana yang masih tidak menentu pasca agresi militer Belanda dan ekonomi masyarakat yang masih terpuruk, pemilu yang dikatakan pertama dan tersukses karena dilaksanakan secara jujur dan adil ini berhasil menggerakkan masyarakat untuk berbondong-bondong mendatangi bilik suara. Seluruh masyarakat tumpah ruah dalam euforia pemilu pertama ini, tak heran lebih dari 90% masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilu pertama ini.

**Tabel 1.1**  
**Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (*Voter Turnout*) di Indonesia**

| Tahun | Pemilih terdaftar | Penguna Hak Pilih (%) | Suara Sah (%) | Suara tidak Sah (%) |
|-------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1955  | 43.104.464        | <b>91,41</b>          | 95,90         | 4,10                |

<sup>7</sup> Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung : Alfa Beta, 2012. h.480.



|                 |                 |             |              |       |       |      |             |
|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-------|-------|------|-------------|
| <i>Sumber</i>   | 1971            | 58.558.776  | <b>96,62</b> | 96,59 | 3,41  | :    | <i>Data</i> |
| <i>Perludem</i> | 1977            | 69.871.092  | <b>96,52</b> | 94,90 | 5,10  | 2015 |             |
|                 | 1982            | 82.134.195  | <b>96,47</b> | 93,71 | 6,29  |      |             |
|                 | 1987            | 93.737.633  | <b>96,43</b> | 95,00 | 5,00  |      |             |
|                 | 1992            | 107.565.413 | <b>95,06</b> | 95,67 | 4,33  |      |             |
|                 | 1997            | 125.640.987 | <b>93,55</b> | 96,13 | 3,87  |      |             |
|                 | 1999            | 118.158.778 | <b>92,74</b> | 96,61 | 3,39  |      |             |
|                 | 2004 Pileg      | 148.000.369 | <b>84,07</b> | 91,19 | 8,81  |      |             |
|                 | 2004 Pilpres I  | 155.048.803 | <b>78,23</b> | 97,83 | 2,17  |      |             |
|                 | 2004 Pilpres II | 152.246.188 | <b>76,63</b> | 97,94 | 2,06  |      |             |
|                 | 2009 Pileg      | 171.068.667 | <b>70,96</b> | 85,59 | 14,41 |      |             |
|                 | 2009 Pilpres    | 176.367.056 | <b>72,56</b> | 94,94 | 5,06  |      |             |
|                 | 2014 Pileg      | 189.642.231 | <b>68,20</b> | 89,04 | 10,96 |      |             |
|                 | 2014 Pilpres    | 190.307.134 | <b>63,73</b> | 94,13 | 5,87  |      |             |

Dari tabel diatas terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum (*voter turnout*) baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif dapat dikatakan cukup tinggi walaupun terdapat kecenderungannya terus turun. Terlepas apakah pada masa Orde Baru (Pemilu 1971-1997) angka partisipasi yang tinggi dikarenakan mobilisasi masyarakat oleh pemerintah yang mengharuskan seluruh masyarakat mengikuti pemilu namun, sesudahnya angka partisipasi masih terus mengalami tren penurunan. Dari beberapa penyelenggaraan pemilu termasuk dalam Pilkada jumlah masyarakat yang golput semakin bertambah. Dalam pemilu presiden 2014 yang lalu angka golput mencapai 37% melebihi jumlah perolehan suara presiden terpilih. Jika dianalisa, tingginya angka masyarakat yang tidak berpartisipasi paling tidak disebabkan oleh beberapa penyebab berupa: 1). Kegagalan rezim penguasa menyelesaikan masalah-masalah krusial masyarakat; 2). Merosotnya sistem demokrasi prosedural itu sendiri; 3). kecenderungan oligarki

partai politik, serta secara mayoritas masyarakat merasa hanya dijadikan tumbal partai politik untuk memperbanyak kursi mereka di DPR atau pun kepala daerah.<sup>8</sup>

Konstitusi menggariskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, setiap lima tahun sekali.<sup>9</sup> Sedang gubernur, bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan Kotadipilih secara demokratis.<sup>10</sup> Dipilih secara demokratis ini kemudian diartikan sebagai pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten dan Walikota dan wakil Walikota untuk kota. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak untuk pertamakalinya digelar pada 9 Desember 2015 dimaksudkan untuk melakukan efisiensi anggaran, peningkatan partisipasi pemilih dan efektifitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah.<sup>11</sup> Dengan jalan menyatukan waktu pelaksanaan Pilkada ternyata tujuan peningkatan partisipasi masyarakat tidak mengalami peningkatan justru terjadi penurunan di Kota Medan. Seperti terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (*Voter Turnout*) Pilkada Serentak 2015**  
**Beberapa Kota Besar di Indonesia**

| No. | Nama Kota         | Jumlah Pemilih   | Pengguna Hak Pilih (%) | Tidak Menggunakan Hak Pilih (%) |
|-----|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1.  | <b>Kota Medan</b> | <b>1.961.471</b> | <b>26,88%</b>          | <b>73,22%</b>                   |

<sup>8</sup> Pangi Syarwi, *Titik Balik Demokrasi : Petunjuk Bagi Para Pejuang Demokrasi*, Jakarta. Pustaka Intelegensia 2012, h.5.

<sup>9</sup> Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

<sup>10</sup> Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

<sup>11</sup> Titi Anggraini. DKK, *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*, Jakarta: Perludem, 2014, h.131

|    |                 |           |        |        |
|----|-----------------|-----------|--------|--------|
| 2. | KotaSemarang    | 1.099.504 | 66,48% | 33,52% |
| 3. | KotaSurabaya    | 2.014.476 | 52,72% | 47,28% |
| 4. | KotaBanjarmasin | 441.833   | 65,63% | 34,57% |
| 5. | KotaDenpasar    | 409.946   | 57,64% | 42,56% |

Sumber : diolah dari website KPU<sup>12</sup>

Hasil survei LSI (lembaga Survei Indonesia) merata-ratakan total partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2015 ada dikisaran 60% atau dengan kata lain rata-rata jumlah golput mencapai 40%. Bahkan di beberapa daerah seperti Kota Medan angka golputnya menyentuh level yang cukup mengkhawatirkan sampai melebihi 70%. Sejatinnya golput adalah fenomena yang alamiah. Fenomena ini ada di setiap pemilihan umum dimanapun termasuk di negara yang demokrasiya dapat dikatakan stabil seperti Amerika Serikat. Hanya saja, tentunya hal ini harus dibatasi jumlahnya.

Tingkat partisipasi pemilu di Medan pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2014 lalu hanya mencapai 56 %. Angka itu termasuk tinggi dibanding partisipasi pada Pilkada 2010 yang hanya 39 % dan Pilkada 2015 yang hanya 26,88%.

**Tabel 1.3**  
**Partisipasi Pemilih (Voter Turnout) dalam Pemilu dan**  
**Pilkada Kota Medan**

| No | Pemilu   | Pemilih Terdaftar (Jumlah DPT) | Pengguna Hak Pilih (%) |
|----|--|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Walikota dan Wakil Walikota Medan 2010         | 1.961.155                      | 39,62%                 |
| 2. | Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara 2013 | 2.121.551                      | 36,62%                 |
| 3. | Legislatif 2014                                | 1.711.878                      | 54,60%                 |

<sup>12</sup> KPU, Hasil Pilkada Serentak 2015, [www.Pilkada2015.kpu.go.id](http://www.Pilkada2015.kpu.go.id) Diakses Pada 25 Januari 2015 pukul 20.25

|    |   |                  |               |
|----|---|------------------|---------------|
| 4. | Presiden dan Wakil Presiden 2014              | 1.746.831        | 56,21%        |
| 5. | <b>Walikota dan Wakil Walikota Medan 2015</b> | <b>1.961.471</b> | <b>26,88%</b> |

*Sumber : KPUD Medan*

*Voter turnout* masyarakat Kota Medan pada Pilkada baik di tahun 2010 maupun tahun 2015 sangat rendah dibandingkan dengan pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif mancerminkan ketidakpercayaan publik Kota Medan terhadap pemerintahan ditingkat lokal. Idealnya pemerintahan ditingkat local (Kota Medan) lebih besar pengaruh dan *effectnya* kepada kehidupan masyarakat dibandingkan dengan pemerintahan ditingkat yang lebih tinggi (provinsi maupun nasional). Kebijakan pembangunan yang dibuat ditingkat lokal lebih bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Sehingga proses pergantian kepemimpinan ditingkat lokal mendapat atensi dan perhatian yang tinggi oleh masyarakat, mulai dari awal prosesnya hingga hadir di TPS untuk memberikan suaranya kepada kandidat yang didukung.

Pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi arena atau wadah bagi setiap masyarakat Kota Medan dapat memanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun serta bentuk usaha dan kontribusi masyarakat untuk kemajuan Kota Medan. Setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye. Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi bukan dengan mobilisasi. Disamping itu, kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sebagaimana di kemukakan tadi sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah. Sikap antusias dari masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil.



## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Medan yang terus menunjukkan *tren* penurunan bahkan sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Jika dicermati lebih jauh penurunan partisipasi ini terjadi secara menyeluruh di semua kecamatan dan TPS.<sup>13</sup> Kecenderungan terus menurunnya angka partisipasi politik masyarakat Kota Medan bahkan telah memecahkan rekor terendah di sepanjang pemilu atau Pilkada di Indonesia.<sup>14</sup>

Partisipasi politik yang hanya 26,88% ini sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilakada akan menjadi sia-sia jika masyarakat tidak menggunakannya untuk menjadi media manifestasi politik atau merepresentasikan dukungan politiknya kepada kandidat. Atau justru sangat rendahnya partisipasi politik ini merupakan gejala yang terlihat bahwa masyarakat Kota Medan sudah sangat apatis lagi terhadap politik dan pemerintahannya. Hal ini dikuatkan oleh kutipan wawancara Yenni Chairiah Rambe, Ketua KPU Kota Medan, menyatakan bahwa,

*“Banyak faktor yang memengaruhi apatisme masyarakat Kota Medan. Salah satunya ialah perspektif masyarakat terhadap output yang dihasilkan oleh proses pemilu. masyarakat menjadi hilang kepercayaannya terhadap pemerintah, masyarakat Kota Medan disuguhkan beberapa kejadian dimana Walikota dan para anggota DPRD yang merupakan hasil pemilu, terlibat kasus”<sup>15</sup>*

---

<sup>13</sup> KPU, *Data tingkat Partisipasi pada Pemilu Walikota Medan 2015-2020*.(online)( [www.Pilkada-2015.KPU/Medankota](http://www.Pilkada-2015.KPU/Medankota)). Diakses Pada 25 Januari 2015 pukul 20.21

<sup>14</sup>Lihat portal berita JPPN.COM, “*Inilah 10 daerah tingkat partisipasi terendah.*” (online) ([www.jpnn.com/news/inilah-10-daerah-tingkat-partisipasi-pemilih-terendah](http://www.jpnn.com/news/inilah-10-daerah-tingkat-partisipasi-pemilih-terendah)) diakses 23 Maret 2016

<sup>15</sup>Lihat Lebih Lanjut, KPU.go.id. 2015, 28 Oktober. “*Kurangi Apatisme Pemilih, KPU Kota Medan Gencar Sosialisasi*”, (Online) (<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4896>) diakses 23 Maret 2016

*Political trust* dan *political efficacy* merupakan dua konsep kunci dalam teori partisipasi politik dan pemerintahan yang demokratis. Di negara-negara dengan demokrasi yang sudah maju, dua variabel ini sangat populer dan sudah banyak diteliti. Rendahnya *political trust* dan *political efficacy* berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi warga pada pemilihan wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun.<sup>16</sup>

Craig dan Niemi menyebut bahwa *political trust* dan *political efficacy* merupakan standar yang sering digunakan untuk mengukur bagaimana sikap politik masyarakat secara umum dan seberapa besar pembangunan sistem demokrasi dalam suatu negara serta kepuasan masyarakat terhadap suatu regim pemerintahan yang berakibat pada partisipasinya dalam proses politik.

*Of the survey measures of general political attitudes, political efficacy and political trust are among the most frequently used. Indeed, they thought to be key indikator of the overall health of democratic sistem. when it was discovered that most people felt relatively efficacious and moderately trusting towards government, this discovery was widely seen as evidance of stability and of our government effectiveness in responding to popular concerns*<sup>17</sup>

Gamson menjelaskan bahwa dalam *political trust* merupakan suatu keyakinan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Individu yang memiliki kepercayaan politik akan cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi. Indikasinya ditunjukkan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik, lembaga politik, maupun demokrasi itu sendiri. berdampak turunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.<sup>18</sup>

Pattie & Johnston<sup>19</sup> menyebut sistem politik yang korup mengakibatkan rendahnya *political trust* masyarakat yang berkorelasi langsung terhadap rendahnya *voter turnout*

---

<sup>16</sup> Restiani Fauzie, 2011 “Adaptasi Dan Validasi Skala Political Trust Dan Political Efficacy” Ciputat : Jurnal JP3I. Vol.III Nomer, 4 Tahun 2014

<sup>17</sup> S. Craig dan G. Niemi 1988, “Political efficacy and trust : a report on the NES pilot study” Jurnal Political Behavioral, vol. 12, no. 3, tahun 1990

<sup>18</sup> Gamson dalam Hasbi Wahyudi, dkk 2013. “Peran Kepercayaan politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa”. Jurnal Psikologi, Vol. 9 No 2 Desember 2013

<sup>19</sup> Pattie & Johnston dalam Restiani Fauzie, 2011 “Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih (Non-Voting Behavior) Pada Pemilihan Gubernur” Takziah Jurnal Psikologi. Vol, 18 Nomer, 02 Tahun 2013

*orang yang kehilangan kepercayaan(distrust) berpikir tentang sistem politik yang korup, yang mungkin menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi. Jika seseorang tidak percaya dengan sistem politik, maka kemungkinan partisipasinya dalam aksi politik menurun (misalnya pemungutan suara)*

Banyaknya aktor politik baik di eksekutif ataupun di legislatif yang terjerat kasus korupsi. Dua gubernur terpilih dalam dua Pilkada langsung yang diselenggarakan divonis melakukan tindak pidana korupsi. Pertama Syamsul Arifin, Ia dipidana karena korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat saat masih menjabat Bupati Langkat. Kemudian Gatot Pujo Nugroho, wakilnya dilantik menggantikannya. Periode berikutnya, Sekandal kasus hibah Bansos 2013 melibatkan Gatot dan hampir seluruh anggota DPRD. Korupsi juga terjadi amat masif di Kota Medan Pada Mei 2008, Walikota Abdillah dan wakil Walikota Ramli.<sup>20</sup> Mereka menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan APBD Medan 2005. Pada periode selanjutnya Rahudman Harahap Walikota Medan 2010-2013 diberhentikan dari jabatannya karena menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 2005.<sup>21</sup>

*Political efficacy* adalah perasaan dimana masyarakat merasa setiap tindakannya akan mampu merubah mempengaruhi proses keadaan politik. Sehingga kehadirannya dalam setiap proses politik diyakini akan menghadirkan perubahan sesuai dengan kehendaknya seperti halnya kehadirannya dalam pemilu. Campbell, Gurin and Mille<sup>22</sup>, mendefenisikan sebuah konsep *political efficacy*:

*‘the feeling that individual political action does have, or can have, an impact upon the political process, i.e., that it is worthwhile to perform one’s civic duties. It is the*

---

<sup>20</sup> Abdilah dan Ramli merupakan Walikota Medan dua periode 2000-2005 dan 2005-2010 melalui pemilihan langsung (Pilkada)

<sup>21</sup> Lihat lebih lanjut dalam portal berita Dakwah.com, “Data Hitam (Korupsi) Pejabat di Sumut 15 Tahun terakhir”. (Online) (<http://dakwahsumut.com/data-hitam-korupsi-pejabat-sumut-15-tahun-terakhir/>) diakses Tanggal 23 Maret 2016

<sup>22</sup>Campbell, Gurin dalam Ann-Kristin Kölln.dkk, 2013, “External Efficacy and Perceived Responsiveness – Same, same or different?” Twente : University of Twente

*feeling that political and social change is possible, and that the individual citizen can play a part in bringing about this change’.*

Korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menggerogoti hampir setiap sendi birokrasi. Masyarakat semakin jauh memperoleh pelayanan seharusnya dan semestinya sesuai hak yang dimiliki sebagai warga negara mengakibatkan kekecewaan masyarakat. Perilaku korupsi yang terjadi di Medan bukan hanya berkembang karena lemahnya pengawasan, tetapi disebabkan adanya dukungan adat yang menganggap perbuatan itu seperti "biasa".

Dalam dialog yang diselenggarakan salah satu stasiun radio di Medan, Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Rurita Ningrum mengatakan kondisi itu dapat dilihat dari budaya yang berkembang di Sumut selama ini. Ia mencontohkan budaya masyarakat Sumut yang sering memberikan sesuatu sebagai "*ingot-ingot*" atau tanda terima kasih ketika menerima jasa orang lain atau sering masyarakat Medan menyebut *hepeng mengatur nagaraon*.<sup>23</sup> Ini menyebabkan birokrasi atau badan pelayanan publik baru dapat melayani ketika sudah diberi uang sebagai "pelicin" setiap melakukan pengurusan. Akibatnya muncul persepsi di masyarakat untuk hadirnya pelayan publik melalui birokrasi yang bersih melayani dan terbebas dari KKN seolah sulit diwujudkan. Masyarakat seolah tak berdaya dan kehilangan harapan seperti yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat, pak Harto (56 tahun) warga kelurahan Teladan Timur dalam wawancara singkat ketika ditanya tentang harapan akan pelayanan publik.

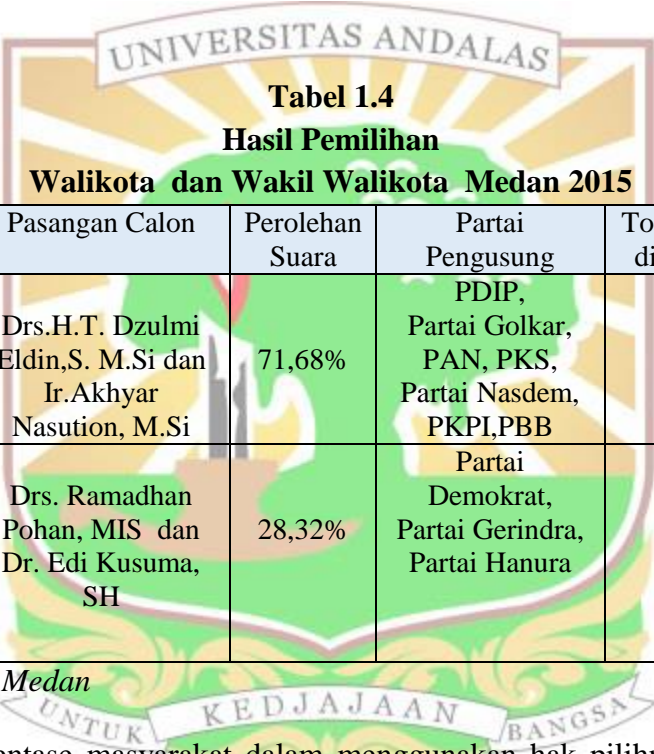
*Kita ini apalah, masyarakat kayak kita manalah bisa merubah keadaan yang udah kayak gini. Orang KKN udah jadi budaya. Namanya aja SUMUT semua urusan menggunakan uang tunai. Kalo nggak ada orang dalam yah paling nyogok kalo nggak mana selesai urusan.*<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Lihat Lebih lanjut. Portal Berita Antara Sumut.com . "*Fitra: Adat Pengaruhi Perilaku Korupsi Di Sumut*". (online) (<http://www.antarasumut.com/berita/155179/fitra-adat-pengaruhi-perilaku-korupsi-di-sumut>)



Fenomena rendahnya *voter turnout* pada pelaksanaan Pilkada, sejatinya menjadi cermin dalam pelaksanaan demokrasi daerah di Indonesia. Terlebih lagi, dengan realitas politik yang hanya lebih mengutamakan kepentingan politik belaka, dibandingkan dengan adanya kesungguhan dalam membangun daerah, menjadi salah satu efek dominan kepada para calon pemilih untuk lebih memilih sikap politik golput pada pelaksanaan Pilkada.



**Tabel 1.4**  
**Hasil Pemilihan**  
**Walikota dan Wakil Walikota Medan 2015**

| No Urut | Pasangan Calon   | Perolehan Suara | Partai Pengusung                                       | Total Kursi di DPRD |
|---------|--|-----------------|--|---------------------|
| 1       | Drs.H.T. Dzulmi Eldin,S. M.Si dan Ir.Akhyar Nasution, M.Si | 71,68%          | PDIP, Partai Golkar, PAN, PKS, Partai Nasdem, PKPI,PBB | 29                  |
| 2       | Drs. Ramadhan Pohan, MIS dan Dr. Edi Kusuma, SH            | 28,32%          | Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura        | 15                  |

Sumber : KPUD Medan

Rendahnya presentase masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Medan juga tidak terlepas dari kandidat yang bertarung dalam Pilkada Kota Medan. Menurut Elfanda Ananda, pengamat sosial politik Sumatera Utara yang dikutip dari wawancara dengan harian Tribun Medan<sup>25</sup>

*“dari sisi figur kandidat, keduanya tidak ada yang bisa ditonjolkan keberhasilannya. Masyarakat sudah cerdas dalam menelusuri jejak rekam keduanya. Sehingga publik tidak mempunyai harapan pada keduanya. Selain itu, biaya politik tetap besar dalam mendapatkan perahu sehingga banyak calon pemimpin tereeliminasi.”*

<sup>25</sup>Lihat Lebih Lanjut. Medan.Tribunnews.com. 2015, 17 Desember. “Penyebab Teramat Rendahnya Partisipasi Pemilih”. (Online) (<http://Medan.tribunnews.com/2015/12/17/ini-tiga-penyebab-teramat-rendahnya-partisipasi-pemilih?page=2>) diakses Tanggal 23 Maret 2016

Sehingga harapan masyarakat akan hadirnya pemimpin baru dari proses demokrasi menjadi semakin sulit terwujud Partai politik yang melakukan penjarangan kandidat dinilai kurang demokratis serta cenderung menggunakan biaya politik yang tinggi mengakibatkan beberapa calon potensial tereliminasi.

Akibatnya masyarakat enggan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilu. Masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Selain itu, mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka. Kemudian pengalaman mereka dalam mengikuti Pilkada ternyata menghasilkan pemimpin yang tidak amanah.<sup>26</sup>

Dari latar belakang dan ulasan di atas, diduga penyebab rendahnya *voter turnout* masyarakat Kota Medan pada Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kota Medan Periode 2015 adalah *political trust* dan *political efficacy*. Oleh karena itu masalah penelitian ini dapat disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Political Trust* terhadap *voter turnout* masyarakat Kota Medan pada Pilkada tahun 2015 ?
2. Bagaimana pengaruh *Internal Political Efficacy* terhadap *voter turnout* masyarakat Kota Medan pada Pilkada tahun 2015 ?
3. Bagaimana pengaruh *External Political Efficacy* terhadap *voter turnout* masyarakat Kota Medan pada Pilkada tahun 2015 ?

---

<sup>26</sup> Dalam beberapa periode kepemimpinan baik Gubernur maupun Walikota selalu terlibat kasus korupsi dan tidak pernah menyelesaikan masa jabatannya dalam keadaan selamat tetapi harus berakhir di balik jeruji besi atau menjadi tersangka KPK serta kasus Korupsi berjamaah yang dilakukan oleh Anggota DPRD Prov Sumut

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang penyebab penurunan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Medan tahun 2015, Serta pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik (*Political Trust*) dan keyakinan masyarakat bahwa mereka mampu mempengaruhi keadaan politik saat ini menuju kepada yang lebih baik (*Political Efficacy*) terhadap kehadiran mereka di tempat pemungutan suara (*Voter Turnout*).

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi dunia pendidikan khususnya kajian terhadap Ilmu politik dan perkembangan demokrasi dan partisipasi politik tentang *vote turnout* pada Pilkada WaloKotadan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2015
2. Secara Praktis, Diharapkan dapat membantu merangsang pihak-pihak tertentu baik Pemerintah baik KPU untuk dapat digunakan dalam membuat kebijakan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan Pilkada dalam waktu-waktu mendatang.